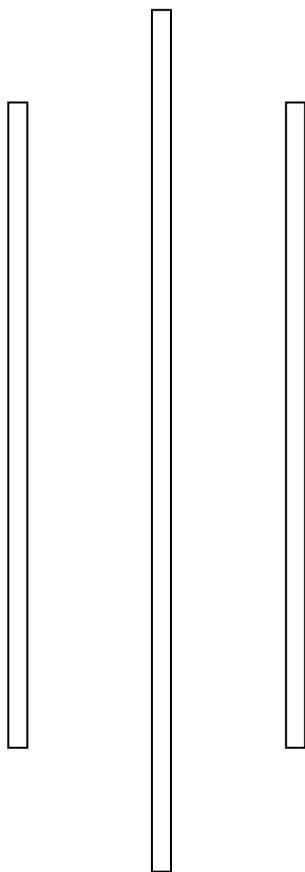




**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN SEMPOR**

Jl. Kaligandu No.107 Jatinegara, Sempor - Kebumen  
Telp. (0287) 471055

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LKjIP )**  
**KECAMATAN SEMPOR**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2022**



**SEMPOR, 17 JANUARI 2023**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabarannya dari Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud *good governance*.

Sempor, 17 Januari 2023

CAMAT SEMPOR  
KABUPATEN KEBBUMEN



Drs. YOSO RAHARJO, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741125 199303B1 002

## DAFTAR ISI

COVER .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2. Fungsi Strategis .....	3
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. Perencanaan Strategis .....	5
1. Rencana Strategis (Renstra).....	5
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	5
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	5
2.2. Perjanjian Kinerja .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	7
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	7
1. Capaian kinerja Tahun 2022 .....	7
2. Capain kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis.....	9
3. Capaian realisasi sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	9
4. Analisis penyebab peningkatan kinerja .....	9
5. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya .....	9
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja .....	9
3.2. Realisasi anggaran .....	13
BAB IV PENUTUP .....	16
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	16
4.2. Permasalahan/Kendala .....	16
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	16
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	6
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	6
Tabel 3.1 Tingkat Capaian Sasaran pada Tahun 2018-2022 .....	8
Tabel 3.2 Program/kegiatan Tahun 2022.....	9
Tabel 3.3 Realisasi APBD Tahun 2022 .....	13

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 .....	8
Diagram 3.2 .....	15

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Gambaran Umum Organisasi

### \* *Dasar Hukum Penyusunan LKjIP*

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan

### \* *Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### \* *Kepegawaian*

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sebanyak 18 orang terdiri dari :

1. Pembina Tingkat I ( IV/a ) : - orang
2. Pembina ( IV/a ) : 2 orang
3. Penata Tk. I (III/d) : 5 orang
4. Penata ( III/c ) : - orang
5. Penata Muda Tk.I (III/b) : 5 orang
6. Penata Muda (III/a) : 1 orang
7. Pengatur Tk. I (II/d) : 3 orang
8. Pengatur (II/c) : - orang
9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1 orang
10. Pengatur Muda ( II/a ) : - orang
11. Juru Tingkat I (I/d) : 1 orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan menurut eselonering adalah :

1. Camat, Eselon IIIa : 1 orang
2. Sekcam, Eselon IIIb : 1 orang
3. Kepala Seksi, Eselon IVa : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IVb : 2 orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan menurut tingkat pendidikan adalah :

1. SLTP : 1 orang
2. SLTA : 8 orang
3. D1 – D3 : 1 orang
4. S1 : 6 orang
5. S2 : 2 orang

\*. *Kekuatan Sumber Daya yang Ada*

1. Geografis / Administrasi

Kecamatan Sempor merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen dan terletak di bagian utara Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayah 10.014 Ha, mempunyai posisi strategis pada jalur lintas ekonomi selatan antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara sekaligus sebagai bagian jalur alternatif yang menghubungkan pantai utara ( Pantura) dengan pantai selatan pulau Jawa.

Kecamatan Sempor memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Karanggayam
- Sebelah Barat : Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gombong dan Kecamatan Kuwarasan

Secara Administrasi Kecamatan Sempor terbagi dalam 16 Desa, 70 Dusun, 78 RW, 375 RT, dengan klasifikasi dan status Desa Berkembang 12 desa dan Desa Maju 4 desa.

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Sempor adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan

Sempor hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam.

### 3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Sempor cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Sebagai salah satu jalur alternatif penghubung pantai utara dengan pantai selatan pulau Jawa yang ada pada saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di bagian utara Kecamatan Sempor. Hal ini juga didukung tersedianya prasarana jalan dan jembatan pada kondisi cukup baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Di bidang kesehatan terdapat sarana Puskesmas 2 unit didukung 8 Poliklinik dan 75 Posyandu. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana pendidikan dan telekomunikasi berupa pesawat telepon, jaringan internet, stasiun radio swasta dan media komunikasi yang lainnya.

### 4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah ( letak geografis ) Kecamatan Sempor sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas wilayah 10.014 Ha yang terdiri dari 1.244 Ha sawah, 4.838 Ha tanah kering dan 3.933 Ha hutan negara. Topografi Kecamatan Sempor didominasi pegunungan dimana dari 16 desa yang ada 9 desa merupakan desa pegunungan. Di sektor kepariwisataan Kecamatan Sempor mempunyai potensi yang menarik dengan adanya bendungan/waduk Sempor. Obyek wisata waduk Sempor merupakan andalan dan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah.

### 5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Kecamatan Sempor memiliki warga dengan tingkat pendidikan SLTA keatas sebesar 19 % sehingga diharapkan dapat menjadi *agent of change* yang dapat memotifasi lingkungannya untuk kemajuan bersama.

## 1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Sempor

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

### **1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi**

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Sempor merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

#### **1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan**

Hal ini ditandai dengan:

- a. Ketersediaan material *e-KTP* terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pada suatu saat dapat terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu
  - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
- #### **2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Sempor**

Kondisi ini dipengaruhi oleh:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
- b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

##### **1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

###### **A. VISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen mendasarkan diri pada visi daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

###### **B. MISI**

Untuk mewujudkan visi daerah dijabarkan dalam misi. Kecamatan Sempor mengemban sebagian dari Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi.

###### **C. TUJUAN**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun. Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :  
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan partisipatif.

##### **2. Indikator Kinerja Utama**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan

##### **3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Pada Tahun 2022 ditetapkan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai mana terdapat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,74

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,74	89,38	89,50	89,62	89,74

	Program	Anggaran	Ket.
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.109.606.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 58.000.000	APBD
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 24.000.000	APBD
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 144.000.000	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.335.606.000</b>	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Capaian kinerja Tahun 2022

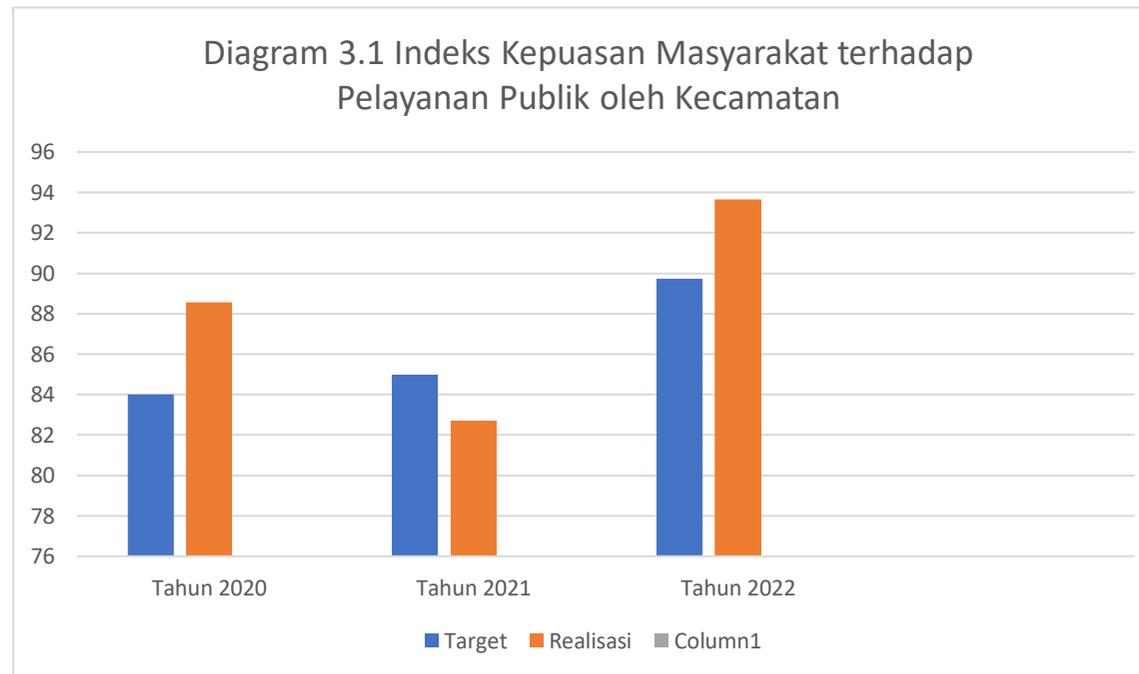
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,74	93,65	104,36

2. Capain kinerja Tahun I pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dibandingkan dengan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya seperti terlihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Sasaran dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	84	88,57	85	82,70	89,74	93,65

Tingkat Capaian Sasaran dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 juga tersaji dalam Diagram 3.1 berikut ini:



3. Capaian realisasi sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan target Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	91,74	93,65

4. Analisis penyebab peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja secara keseluruhan disebabkan penggunaan sumber daya yang ada secara maksimal baik dana maupun sumber daya manusia yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

a. Sumber daya manusia

Pada tahun 2022 dengan 18 orang PNS dan 3 orang THL Kecamatan Sempor dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat dengan semangat memberikan pelayanan terbaik.

b. Sumber daya anggaran

Anggaran kegiatan tahun 2022 sebesar Rp. 2.335.606.000,- terealisasi Rp. 2.260.805.502,- atau 96,80 %.

c. Sumber daya aset

Dengan aset tetap senilai Rp. 905.905.028,- pada tahun 2022 dirasa cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersaji pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Table 3.2 Program/kegiatan Tahun 2022

No.	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	<i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 6.600.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)

No.	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 2.000.000,00 Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP,SPIP, LPPD)
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 1.927.101.000,00 Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 17.000.000,00 Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 2.000.000,00 Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 13.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 2.900.000,00 Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 1.600.000,00 Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 7.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 1.500.000,00 Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
11	Sub Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 2.000.000,00 Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
12	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 10.000.000,00 Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

No.	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 1.650.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 34.367.000,00 Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 17.000.000,00 Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 34.000.000,00 Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 2.000.000,00 Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 3.000.000,00 Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 19.888.000,00 Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 5.000.000,00 Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>		
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		
21	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 58.000.000,00 Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran)

No.	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		
22	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 24.000.000,00 Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		
23	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 23.000.000,00 Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
24	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 17.000.000,00 Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
25	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 11.000.000,00 Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
26	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Inputs Outputs	APBD 2021 Rp. 21.000.000,00 Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam
27	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 65.000.000,00 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa)

No.	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
28	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Inputs Outputs	APBD 2022 Rp. 7.000.000,00 Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan ( program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes)

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut:

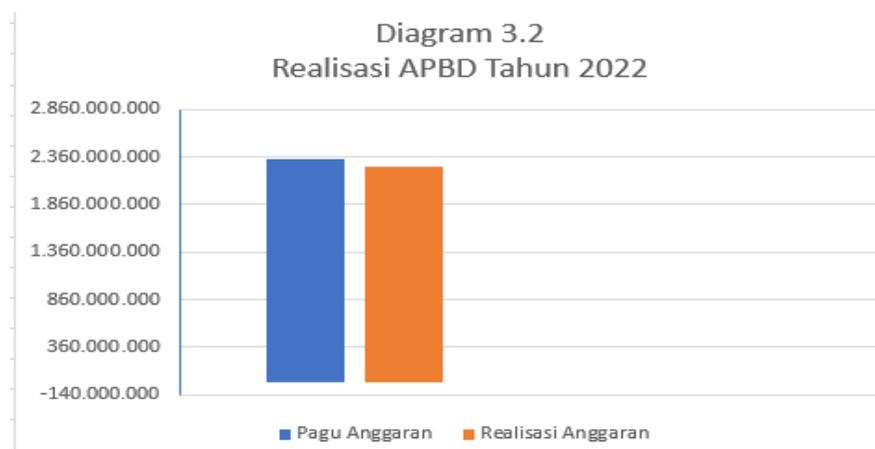
Tabel 3.3 Realisasi APBD Tahun 2022

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ( Rp )	PERS EN T ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
<b>SASARAN : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK OLEH KECAMATAN</b>				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.600.000	6.550.000	99,24	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.967.300	98,37	
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.927.101.000	1.874.344.939	97,26	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.000.000	16.925.010	99,56	
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	13.000.000	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.900.000	2.900.00	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.600.000	1.560.000	97,50	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	6.943.000	99,19	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000	1.260.000	84,00	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ( Rp )	PROSENTASE (%)	KET
1	2	3	4	5
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2.000.000	1.974.500	98,73	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	10.000.000	9.980.000	99,80	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	1.650.000,00	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.367.000	31.518.851	91,71	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	17.000.000	17.000.000	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000,00	33.388.802	98,20	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.953.000	97,65	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.888.000	19.878.500	99,95	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100	
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b> <i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	58.000.000	57.208.800	98,64	
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b> <i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ( Rp )	PROSENTASE (%)	KET
1	2	3	4	5
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> <i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	24.000.000	23.980.300	99,92	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.000.000	21.583.300	93,84	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.000.000	14.986.900	88,16	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.000.000	10.883.800	98,94	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.000.000	19.257.000	91,70	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	65.000.000	54.861.500	84,40	
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000	5.250.000	75,00	
<b>Jumlah</b>	<b>2.335.606.000</b>	<b>2.260.805.502</b>	<b>96,80</b>	

Realisasi anggaran tersebut diatas juga disajikan pada Diagram 3.2 dibawah ini:



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai (tersaji pada Tabel 3.1). Adapun pencapaian tersebut didukung oleh 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yang terinci dalam 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2.260.805.502 dari Rp. 2.335.606.000 atau sebesar 96,80 %.

### 4.2 Permasalahan/ Kendala

Dampak pandemi COVID19 berskala global sejak awal tahun 2020 masih terasa sampai dengan tahun 2022 membuat proses pencapaian kinerja kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Ketersediaan Material (Blanko e-KTP) mengalami kekosongan beberapa waktu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan;
- 2) Penyelenggaraan rapat-rapat banyak diselenggarakan secara virtual sehingga penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkurang sesuai dengan kebutuhan;

### 4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dengan dicabutnya status pandemi COVID19 oleh pemerintah pusat pada akhir Tahun 2022 maka harapan pencapaian kinerja yang meningkat pada tahun berikutnya sangat mungkin diwujudkan. Upaya-upaya yang akan ditempuh diantaranya:

- 1) Memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai kinerja yang tinggi;
- 2) Dalam pelaksanaan perawatan ruang pelayanan berorientasi pada kenyamanan seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada lansia , penyandang difabel dan anak-anak (ramah anak);
- 3) Mempertahankan Tenaga Harian Lepas (THL) yang didapat melalui seleksi yang ketat untuk menjaga kompetensi sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini disusun untuk menyajikan pencapaian kinerja organisasi sampai dengan tahun 2022 dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN' at the top and 'KECAMATAN SEMPOR' at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink over the text 'KECAMATAN SEMPOR'. Below the stamp, the name 'Drs. YOSO BAHARJO, M.Si' is printed, followed by the title 'Pembina' and the NIP number 'NIP. 19741125 199303 1 002'.

Drs. YOSO BAHARJO, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741125 199303 1 002